

Katalog : 4102004.1301

ISSN : -

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB KEPULAUAN MENTAWAI 2023

Vol 4, 2023



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI*

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KAB KEPULAUAN MENTAWAI 2023

Vol 4, 2023

<https://mentawaikab.bps.go.id>



*BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI*

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2023 Vol 4,2023

Katalog	: 4102004.1301
ISSN	: -
Nomor Publikasi	: 13010.2319
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah halaman	: xi + 49 halaman
Penyusun Naskah	: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
Penyunting	: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pembuat Kover	: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
Penerbit	: BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai
Sumber Ilustrasi	: <i>canva, freepik, flaticon, Alex Lapuerta, flickr</i>
Dicetak Oleh	: CV. Media Kreasindo Jaya

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai

TIM PENYUSUN
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2023
Vol 4,2023

Pengarah :
Eriwarman, S.E

Penanggung Jawab :
Nada Asria Farazilah

Penyunting:
Aneesha Kharisma Daryodi, S.Tr.Stat
Afifah Jahra, S.Tr.Stat

Pengolah Data :
Nada Asria Farazilah, S.Tr.Stat

Penata Letak :
Nada Asria Farazilah, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 ini merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Tarif dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Tuapejat, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Eriwarman SE,

DAFTAR ISI
CONTENTS LIST

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xiii
I . PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan.....	3
1.2 Sistematika Penyajian.....	4
1.3 Sumber Data	4
1.4 Konsep dan Definisi.....	5
II . KEPENDUDUKAN.....	11
2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	14
2.2 Komposisi Penduduk.....	16
2.3 Keluarga Berencana.....	18
III. PENDIDIKAN.....	21
3.1 Fasilitas Pendidikan.....	23
3.2 Rata-rata Lama Sekolah.....	25
3.3 Partisipasi Sekolah.....	25
IV. KESEHATAN.....	31
4.1 Sarana Kesehatan.....	33
4.2 Umur Harapan Hidup.....	35
V . KETENAGAKERJAAN.....	37
5.1 Status Pekerjaan.....	39
VI. KEMISKINAN.....	43
6.1 Garis Kemiskinan	45
6.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	46

DAFTAR TABEL

TABLE LIST

Tabel		Halaman
2.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022	14
2.2	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2022	17
3.1	Persentase Penduduk umur 15 tahun keatas berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2023	26
3.2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) formal dan non formal Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	27
3.3	Angka partisipasi kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022	27
3.4	Angka partisipasi Murni (APM) formal dan non formal menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	28
4.1	Jumlah Polindes, Posyandu, Poskesdes, Pustu, dan Puskesmas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022	34
4.2	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2023	35
5.1	Persentase Penduduk Berusia 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan selama seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022	40
5.2	Persentase Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai	41
6.1	Garis kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai, tahun 2019-2023	45
6.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Kepulauan Mentawai, tahun 2019-2023	47

DAFTAR GAMBAR

PICTURE LIST

Gambar		Halaman
2.1	Persentase Penduduk menurut wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022	15
2.2	Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022	16
2.3	Jumlah PUS, Peserta KB Aktif, Target dan Realisasi Akseptor Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2022	18
3.1	Jumlah Sekolah menurut tingkatan sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	24

<https://mentawai.kab.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	: Angka Kematian Bayi
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASI	: Air Susu Ibu
ASFR	: <i>Age specifk Fertility Rate</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
KB	: Keluarga Berencana
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
CBR	: <i>Crude Birth Rate</i>
SD/PS	: Sekolah Dasar
SM/SHS	: Sekolah Menengah
SMP/JHS	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Sensus Penduduk
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
GRR	: <i>Gross Reproductive Rate</i>
NRR	: <i>Net Reproductive Rate</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
AKABA	: Angka Kematian Balita
CDR	: <i>Crude Death Rate</i>
IMR	: <i>Infant Mortality Rate</i>
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UKBM	: Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
AMH	: Angka Melek Huruf
APK	: Angka Partisipasi Kasar
UNDP	: United Nations Development Programme
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TSP	: Tingkat Setengah Pengangguran
GK	: Garis Kemiskinan
ART	: Anggota Rumah Tangga
KRT	: Kepala Rumah Tangga

<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki visi “Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut memberikan sebuah harapan sekaligus tantangan untuk menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih maju dan sejahtera yang seiring dengan tujuan pembangunan Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya dapat diukur dengan dukungan data yang handal, akurat, terkini dan representatif. Dengan adanya data-data tersebut diharapkan tidak akan terjadi bias atau salah sasaran dalam menentukan sebuah kebijakan pembangunan.

Secara umum, tujuan pembangunan berujung pada meningkatnya kualitas hidup manusia yang lazim kita sebut dengan kesejahteraan. Namun hingga saat ini masih sulit untuk mengetahui ukuran kesejahteraan tersebut. Hal ini dikarenakan kata kesejahteraan mengandung makna yang menyangkut segala sendi kehidupan bagi manusia, yang akhirnya acap kali menjadi bahan perdebatan. Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2023) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2023). Kedua survei tersebut merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh BPS untuk mendapatkan informasi tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut tercermin melalui keadaan sosial ekonomi masyarakat yang digambarkan melalui variabel-variabel kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, konsumsi rumah tangga, dan data sosial lainnya.

1.1 Tujuan

Secara umum pembuatan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan dan persebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pengeluaran rumahtangga, dan kemiskinan, serta perumahan. Dengan tersedianya publikasi ini diharapkan

1.2 Sistematika penyajian

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023, disusun dalam enam bab. Adapun uraian setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan memuat tinjauan umum, tujuan, sistematika, sumber data, serta konsep dan definisi.
2. Bab II: Kependudukan dan KB memuat data tentang jumlah penduduk dan karakteristik penduduk di antaranya penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan keluarga berencana (KB).
3. Bab III: Pendidikan memuat data tentang pendidikan seperti partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi penduduk, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan, serta kemampuan membaca dan menulis.
4. Bab IV: Kesehatan memuat data tentang kesehatan masyarakat serta sarana yang telah tersedia.
5. Bab V: Ketenagakerjaan memuat data tentang penduduk umur kerja, status pekerjaan dan sebagainya.
6. Bab VI: Kemiskinan menyajikan data garis kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan perumahan, yang meliputi kondisi perumahan dan fasilitas perumahan.

1.3 Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) terdiri atas berbagai macam data, yang dikumpulkan oleh BPS (primer), maupun mengutip data dari pihak lain (sekunder). Untuk data primer bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2022-2023, sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Konsep dan Definisi

- **Rumah tangga** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah kebutuhan rumah tangga yang biasanya diurus bersama menjadi satu.
- **Anggota Rumah Tangga (ART)** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
- **Status perkawinan**
 1. **Kawin** adalah status mereka yang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara ,dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami/istri.
 2. **Cerai Hidup** adalah status mereka yang telah hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai atau belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin.
 3. **Cerai mati** adalah status mereka yang suami atau istrinya meninggal dunia dan belum kawin lagi.

- **Anak Lahir Hidup** adalah semua anak yang waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.
- **Anak Masih Hidup** adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.
- **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain.
- **Pendidikan.**
 1. **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan perguruan tinggi (PT).
 2. **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

- **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.
 1. **Belum tamat SD** adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.
 2. **SD** meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat.
 3. **SMP** meliputi jenjang pendidikan SMP umum, madrasah tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.
 4. **SMA** meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.
 5. **Diploma/Sarjana** adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), dan spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.
- **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.
- **Angka Buta Huruf** adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.

- **Angka Partisipasi;**
 1. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut.
 2. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.
 3. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal, dll.
- **Sakit** adalah menderita penyakit akut, kronis, atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.
- **Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan** adalah penolong kelahiran terakhir oleh dokter, bidan, dan tenaga medis.
- **ASI (Air Susu Ibu)** adalah satu-satunya makanan terbaik bagi bayi dan juga makanan alami, yang komposisinya memenuhi seluruh kebutuhan bayi selama enam bulan. ASI mengandung zat kekebalan yang memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit dan juga mengandung enzim yang akan membantu pencernaan. Menyusui dengan rasa kasih sayang dapat mempererat ikatan batin ibu dan bayi.

- **Mengobati sendiri** adalah upaya anggota rumah tangga (ART) yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- **Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang menganggur.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).
- **Menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang dikategorikan sebagai penganggur adalah mereka yang sedang:
 1. Mencari pekerjaan;
 2. Mempersiapkan suatu usaha;
 3. Sudah diterima bekerja namun belum memulainya, dan;
 4. Mereka yang tidak mencari pekerjaan akibat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.
- **Mencari Pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

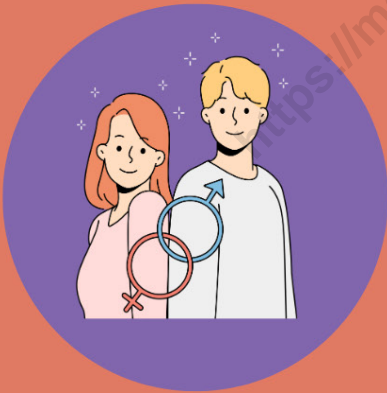
- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan atas risiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/ pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.
- **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja.
- **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh/karyawan.
- **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka** adalah persentase angkatan kerja yang menganggur dan tidak sedang mempunyai pekerjaan.
- **Pengeluaran Rumah Tangga sebulan** adalah biaya yang biasanya dikeluarkan oleh rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan.

BAB II

KEPENDUDUKAN



Laju **Pertumbuhan Penduduk** di Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 adalah **1,15** %



Sex Ratio pada tahun 2022 adalah **108**

Dari 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki



Kepadatan Penduduk **14,83**

Setiap 1 km² ditempati oleh rata-rata sekitar 14 -15 jiwa

<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB II

KEPENDUDUKAN

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Namun pembangunan tersebut tidak pernah terlepas dari permasalahan, salah satu permasalahan yang paling disoroti adalah masalah kependudukan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menuangkan visi dan misi terbarunya antara lain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Pemerintah sadar bahwa peran penduduk dalam pembangunan sangatlah besar, namun jumlah penduduk yang besar tidak selalu memberikan dampak positif. Penduduk dengan jumlah yang besar namun tidak memiliki kualitas yang baik ke depannya hanya akan menjadi beban dalam pembangunan.

Dalam usahanya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan merencanakan strategi pembangunan yang lebih mengutamakan kebijaksanaan dalam hal kependudukan khususnya diarahkan kepada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Program Keluarga Berencana (KB) dan pemerataan persebaran penduduk secara serasi antar wilayah merupakan beberapa contoh upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Mengingat pentingnya aspek dan dinamika kependudukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi kegiatan program pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, sehingga upaya-upaya yang telah dilaksanakan harus terus dilanjutkan dan bila perlu lebih ditingkatkan.

Dalam menunjang kegiatan pembangunan tersebut, maka ketersediaan data dan informasi tentang kependudukan yang lengkap, akurat, dan representatif akan sangat membantu dalam mengevaluasi kegiatan yang sudah atau sedang berjalan dan mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk.

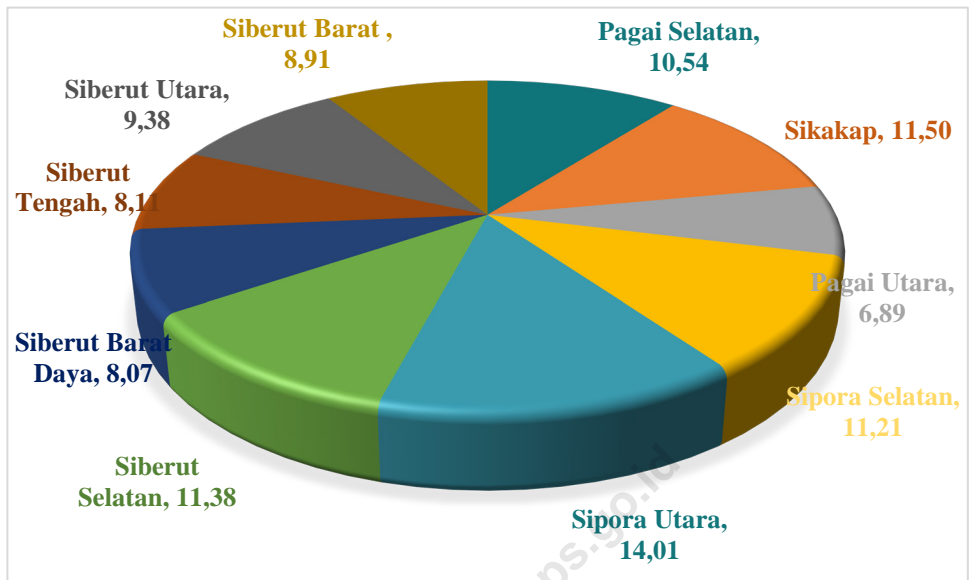
2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 adalah 89.401 jiwa yang terdiri dari 46.431 jiwa penduduk laki-laki dan 42.970 jiwa penduduk perempuan. Dengan begitu, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan *sex ratio* sebesar 108. Artinya, dari 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas wilayah 6033,76 km² memiliki kepadatan penduduk sebesar 15 jiwa/km². Artinya, setiap 1 km² di daerah Kepulauan Mentawai dihuni oleh sekitar 15 penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk pada suatu wilayah, salah satu permasalahan terkait kepadatan penduduk yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai masih terbilang rendah karena masih banyak daerah-daerah yang termasuk hutan dan belum dihuni oleh penduduk. Daerah di Kepulauan Mentawai yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu Kecamatan Sipora Utara dengan 45,99 jiwa/km² dan yang terendah yaitu Kecamatan Siberut Barat dengan kepadatan 6,58 jiwa/km².

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Pagai Selatan	9.421	11,06
Sikakap	10.280	32,88
Pagai Utara	6.157	16,58
Sipora Selatan	10.022	28,77
Sipora Utara	12.528	45,99
Siberut Selatan	10.173	31,02
Siberut Barat Daya	7.213	7,11
Siberut Tengah	7.251	12,30
Siberut Utara	8.387	10,72
Siberut Barat	7.969	6,84
Total	89.401	14,82

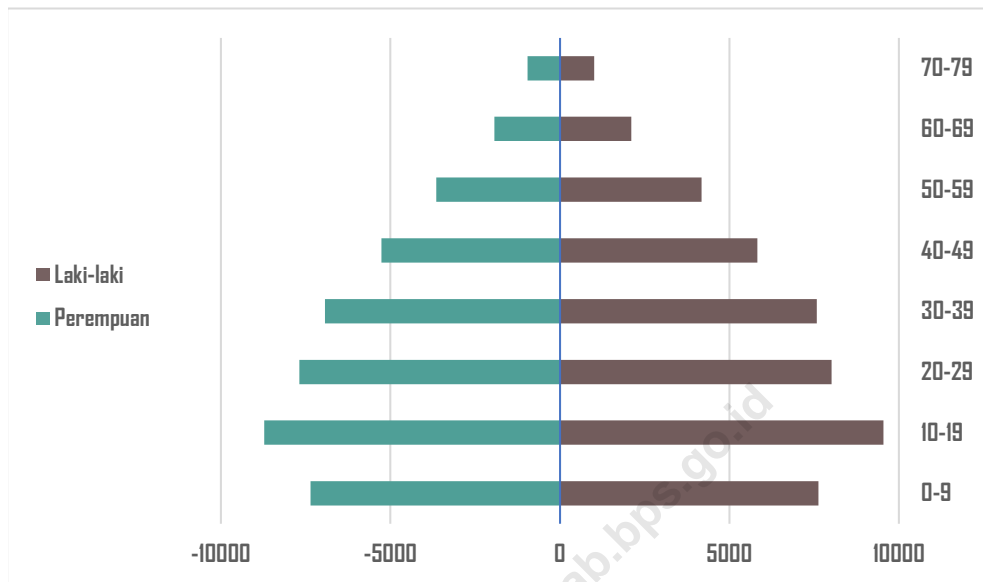
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2023



Gambar 2.1 Persentase Penduduk menurut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 2022

Gambar 2.1 menunjukkan distribusi penyebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, melalui diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sipora Utara memiliki penduduk paling banyak yaitu 14,01 persen, selanjutnya disusul oleh Kecamatan Sipora Selatan dengan angka 11,21 persen. Hal ini dipengaruhi oleh lokasi geografis dua kecamatan yang berada di Pulau Sipora yang notabene merupakan ibu kota kabupaten, sentral dari aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Disisi lain, daerah paling sedikit dihuni oleh penduduk adalah Kecamatan Siberut Barat dengan angka 8,07 persen. Kecamatan Siberut Barat merupakan kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, kondisi geografis yang sulit diakses dan banyaknya fasilitas umum yang belum tersedia dan memadai menjadi beberapa alasan dari sedikitnya penduduk yang menempati wilayah ini.

2.2 Komposisi Penduduk



Gambar 2.2 Piramida Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022

Piramida penduduk merupakan grafik yang digunakan untuk menjelaskan kondisi demografis dari suatu populasi atau kelompok penduduk. Demografi yang masuk ke dalam piramida penduduk ini maksudnya adalah jenjang usia dan jenis kelamin. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa piramida penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai tergolong dalam jenis piramida penduduk berbentuk limas (*expansive*) yang menunjukkan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda. Jumlah penduduk usia muda yang lebih banyak daripada jumlah penduduk usia dewasa menunjukkan pertumbuhan penduduk dan kelahiran bayi yang tinggi.

Informasi penduduk berdasarkan pengelompokan usia produktif berguna untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang berpotensi dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, dalam konsep kependudukan, pengelompokan usia dibagi menjadi tiga, kelompok usia yang belum produktif (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia 65 tahun ke atas yang sudah dianggap kurang produktif. Dari tiga kelompok usia tersebut, penduduk usia produktiflah yang berperan penting dalam modal

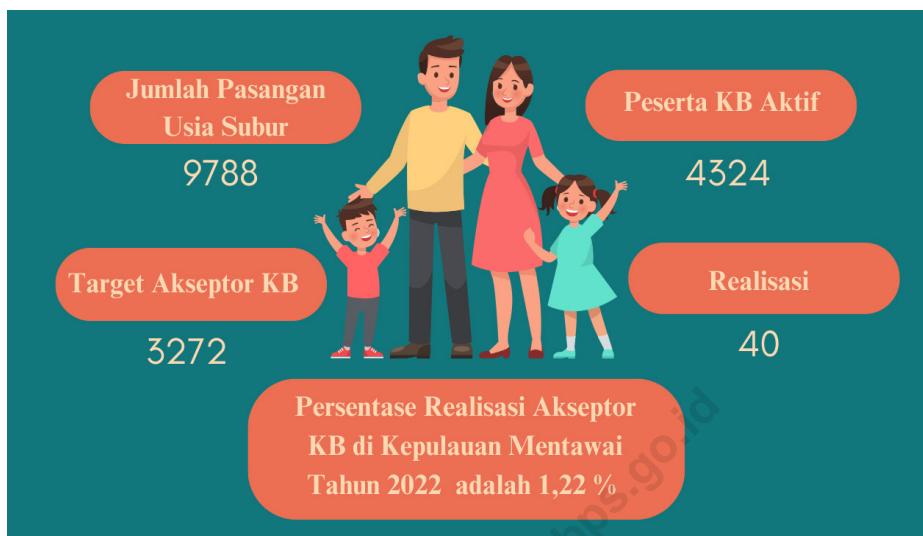
pembangunan. Berdasarkan Tabel 2.2 Penduduk usia produktif (15-64 tahun) di yaitu mencapai 61.129 jiwa atau sekitar 68,4 % dari total seluruh penduduk di Kepulauan Mentawai. Besarnya angka tersebut menandakan suatu daerah akan segera memasuki fase baru yang dikenal dengan bonus demografi. Di Indonesia sendiri, puncak bonus demografi diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang. Bonus demografi dikatakan sebagai sebuah bonus manakala generasi muda mampu mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang layak guna meningkatkan kualitas dirinya. Oleh karena itu, suatu daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan harapan akan dapat mencetak calon-calon pemimpin di masa depan supaya nantinya bonus demografi tersebut betul-betul akan menjadi sebuah bonus.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk menurut Kelompok umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2022

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
0-4	4,04	4,02	3,85	3,83	7,89	7,85
5-9	4,59	4,55	4,47	4,43	9,06	8,97
10-14	5,64	5,50	5,29	5,19	10,93	10,69
15-19	5,17	5,13	4,58	4,55	9,74	9,68
20-24	4,63	4,58	4,35	4,30	8,98	8,88
25-29	4,44	4,43	4,34	4,32	8,78	8,75
30-34	4,55	4,57	4,36	4,39	8,92	8,96
35-39	4,03	4,06	3,47	3,49	7,50	7,55
40-44	3,53	3,55	3,26	3,28	6,79	6,83
45-49	3,06	3,10	2,70	2,72	5,76	5,82
50-54	2,74	2,77	2,35	2,37	5,03	5,15
55-59	1,98	2,02	1,77	1,80	3,69	3,82
60-64	1,50	1,53	1,39	1,42	2,83	2,94
64-69	0,89	0,92	0,80	0,83	1,62	1,74
70-74	0,67	0,72	0,65	0,69	1,24	1,41
75+	0,47	0,50	0,43	0,46	0,87	0,96
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk

2.3 Keluarga Berencana



Gambar 2.3 Jumlah PUS, Peserta KB Aktif, Target dan Realisasi akseptor Keluarga Berencana di Kepulauan Mentawai, 2022

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangan panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Pada tahun 2022, persentase realisasi akseptor KB baru di Kepulauan Mentawai terbilang sangat kecil, hanya 1,22 % dari target yang ditentukan. Angka ini tentu menjadi evaluasi bagi subject matter yang menangani bidang ini. Adapun tantangan yang sekiranya dihadapi Petugas KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain meliputi wilayah kerja berbentuk kepulauan, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, serta belum terbukanya masyarakat adat terhadap program KB.

Dalam penelitian (Nurjannah & Susanti, 2018) juga ditemui kendala dalam implementasi program KB, selain pemberdayaan yang kurang, faktor pemahaman serta antusias masyarakat juga memberikan peran penting dalam keberhasilan program tersebut. Banyak orang yang menyadari manfaat dari layanan keluarga berencana, tetapi mereka mengeluh kesulitan untuk mengakses

layanan keluarga berencana karena fasilitas kesehatan yang disediakan berada jauh dari rumah mereka (Marrone et al., 2014). Oleh karenanya, integrasi antar pihak perlu dilakukan, tidak hanya kepada masyarakat sebagai pengguna program keluarga berencana tetapi juga kepada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan dan jasa tindakan KB bagi masyarakat

Dengan cakupan target akseptor KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB di-picu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin sedikitnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan risiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

BAB III

PENDIDIKAN



Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani pada tahun 2023

7,76



Harapan Lama Sekolah

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7-24 tahun sebesar

12,9 tahun

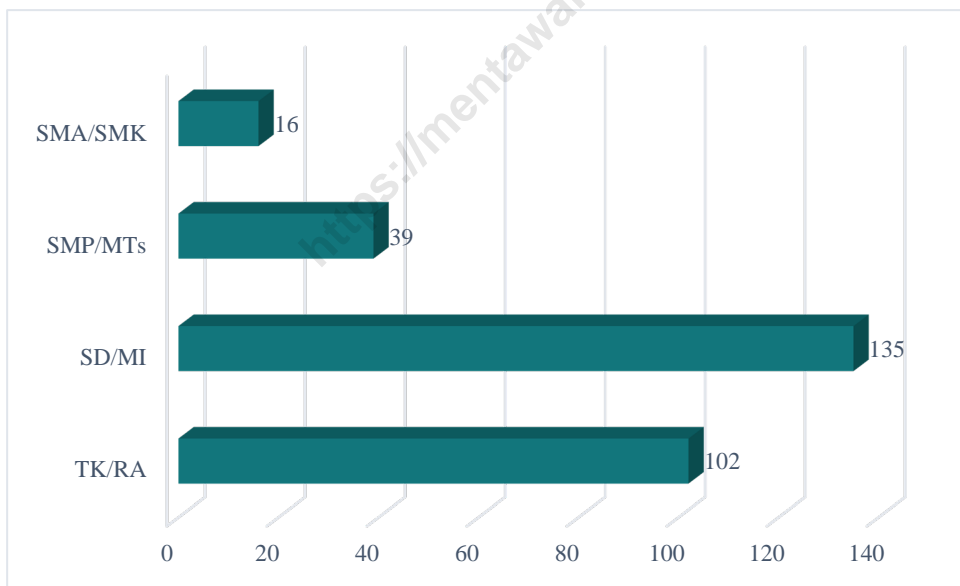
BAB III PENDIDIKAN

3.1 Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup manusia. Pendidikan nasional merupakan salah satu usaha yang paling mendapat perhatian pemerintah, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan bangsa. Di samping itu, program pendidikan ini merupakan usaha untuk memperbaiki mutu kehidupan serta pengembangan diri sebagai suatu bangsa yang berkualitas dan besar. Peningkatan kualitas hidup penduduk sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik sumber daya manusianya, dan akan semakin maju bangsa tersebut. Berbekal pendidikan yang cukup memadai seseorang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada skala yang besar, pendidikan masyarakat merupakan objek untuk melihat tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan diri.

Pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, maka sejak Pelita I (1969) Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Hingga sekarang usaha pemerintah terus ditingkatkan dan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun yang diiringi dengan peningkatan kualitas pendidik melalui penyetaraan dan penjenjangan pendidikan guru, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN. Jika program perpanjangan wajib belajar ini diterapkan dengan baik maka penduduk Indonesia yang sebagian besar didominasi penduduk muda ini akan mendapat manfaat dari peningkatan akses pendidikan. Namun demikian, tujuan dari pendidikan hanya dapat tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan orang tua.

Untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan ada tiga indikator yang dapat mengukur kondisi pembangunan pendidikan yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator output. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.



Gambar 3.1 Jumlah Sekolah menurut tingkatan sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal yang pernah diduduki. Angka rata-rata lama sekolah ini berguna dalam untuk menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penghitungan lama sekolah seseorang, dilihat dari jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dengan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Angka rata-rata lama sekolah ini bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun program pengembangan pendidikan di wilayah yang bersangkutan, serta juga sebagai bahan evaluasi Program Wajib Belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, angka Rata-rata Lama Sekolah bernilai sekitar 7,76 tahun. Angka ini masih dibawah dari target program pemerintah Wajib Belajar 9 tahun. Jika dilihat dari angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 yang bernilai 12,9 tahun, ini menunjukkan bahwa sebenarnya rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai ingin menamatkan pendidikan hingga ke jenjang SMA, namun hal itu tidak dapat dilakukan karena berbagai keterbatasan. Faktor ekonomi merupakan salah satu masalah yang menjadi pengaruh bagi perkembangan pendidikan. Penyelenggara sarana pendidikan yang belum merata menjadikan anak-anak Mentawai yang tidak berdomisili di pusat kecamatan mewajibkan meninggalkan kampung halaman menuju sekolah melewati perjalanan jauh.

3.3 Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Karena dengan partisipasi sekolah kita dapat melihat daya serap sistem pendidikan terhadap umur sekolah. Program

partisipasi sekolah, berbagai cara telah dilakukan pemerintah antara lain membangun sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan subsidi bagi sekolah-sekolah negeri sehingga penduduk yang kurang mampu juga dapat bersekolah.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Jenis Ijazah	Laki-laki	Perempuan
Tidak mempunyai Ijazah	19,32	26,97
SD/ sederajat	22,94	26,65
SMP/ sederajat	17,70	16,52
SMA ke atas	40,04	29,86
Total	100,00	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Berdasarkan tabel 3.1 maka dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk umur 15 tahun keatas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan didominasi pada tingkatan SMA ke atas dengan persentase laki-laki 40,04% dan perempuan 29,86 %. Namun disisi lain, penduduk 15 tahun keatas di Kepulauan Mentawai juga masih banyak yang tidak memiliki ijazah apapun. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan memperoleh ijazah formal , terkhusus dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat partisipasi sekolah yang lebih detail , maka digunakanlah indikator APS (Angka Partisipasi Sekolah) yang dibagi menjadi 3 (Tiga) kelompok umur yaitu 7-12 , 13-15 dan 16-18. APS ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi sekolah penduduk yang berusia sekolah dalam pendidikan formal maupun non formal berdasarkan kelompok usia nya tanpa mempedulikan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh dalam kelompok usia tersebut.

Tabel 3.2 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) formal dan non formal Penduduk menurut Kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
7-12	99,25	99,71	99,49
13-15	98,38	95,78	96,94
16-18	75,45	69,14	73,02
19-23	24,84	16,77	21,28

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di usia 7-12 tahun sebesar 99,49 persen pada tahun 2022, artinya bahwa sekitar sebanyak 99,49 penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang bersekolah. Kemudian untuk kelompok umur 13-15 ada sebanyak 96,94 persen penduduk juga sedang menempuh pendidikan. Untuk kelompok umur 16-18 terlihat penurunan APS jika dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih muda yaitu diangka 73,02 persen. Untuk kelompok umur selanjutnya terlihat penurunan yang sangat signifikan, yaitu hanya sekitar 21,28 % penduduk yang bersekolah di usia 19-23 tahun. Hal ini dapat disebabkan karna Pemerintah hanya mewajibkan wajib belajar 9 tahun, jadi kesadaran untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jika tidak diwajibkan tergolong cukup rendah.

Tabel 3.2 Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

Jenjang Pendidikan	APK
SD/MI	116,45
SMP/MTs	77,61
SMA/SMK/MA	68,54

Sumber: Kepulauan Mentawai dalam Angka 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang seharusnya berada pada

jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di tingkat pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing tingkat pendidikan.

APK yang lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 untuk jenjang SD sebesar 116,45 persen, sementara APK SMP sebesar 77,61 persen dan APK SMA sebesar 68,54 persen. Angka Partisipasi Kasar penduduk tertinggi masih di jenjang pendidikan SD/MI. Hal ini menandakan banyaknya anak-anak yang bersekolah di jenjang SD tetapi umurnya berada diluar usia ideal untuk menempuh jenjang pendidikan SD yaitu 7-12 tahun.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) formal dan non formal menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
SD/MI	93,80	99,71	96,94
SMP/MTs	65,63	69,37	67,69
SMA/SMK/MA	60,59	50,58	56,74
Perguruan Tinggi	19,66	4,65	13,03

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023

Seperti APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap tingkat pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di tingkat pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Berdasarkan Tabel 3.4 APM jenjang pendidikan APM SD pada tahun 2022 sebesar 96,94 persen, angka ini menunjukkan bahwa sekitar 96,69 persen penduduk berusaha 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI sederajat. Begitu juga dengan APM SMP sederajat, menunjukkan bahwa sebanyak 67,69 persen penduduk berusia 13-15 tahun bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan seharusnya yaitu SMP sederajat. Kemudian APM SMA yang bernilai 56,74 menunjukkan bahwa sebesar 56,74 persen penduduk berusia 16-18 tahun bersekolah di jenjang pendidikan SMA sederajat. APM Perguruan tinggi senilai 13,03 yang artinya 13,03 persen usia 19-23 tahun menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB IV

KESEHATAN



Jenis Tenaga Kesehatan

yang paling banyak tersedia di Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 adalah Perawat (353) dan Bidan (263)



Umur Harapan Hidup (UHH)

Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 adalah **71,06**.

BAB IV KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, mandiri, cerdas, dan produktif serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk telah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya melalui pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta dapat menjangkau masyarakat luas.

Upaya tersebut diarahkan untuk memantapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan pada akhirnya kesejahteraan lahir dan batin dapat tercapai. Selain itu juga diadakan berbagai penyuluhan kesehatan yang ditujukan agar penduduk mempunyai kesadaran untuk berperilaku sehat.

Pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat diusahakan melalui partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan tidak hanya kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4.1 Sarana Kesehatan

Pemerintah telah menyediakan sarana atau fasilitas kesehatan yang memadai sebagai upaya untuk mengatasi masalah kesehatan. Program tersebut terus ditingkatkan agar seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf, dan status kesehatan penduduk.

Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta diharapkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat akan dapat diatasi. Sehingga akan tercipta masyarakat yang sehat dan pada gilirannya akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan produktif. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan harus didukung oleh kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang cukup baik, kemudahan akses, serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Tabel 4.1 Jumlah Polindes, Posyandu, Poskesdes, Pustu, dan Puskesmas menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

Kecamatan	Polindes	Posyandu	Poskesdes	Pustu	Puskesmas
Pagai Selatan	10	50	18	5	2
Sikakap	15	40	5	1	1
Pagai Utara	5	30	7	3	1
Sipora Selatan	-	22	8	6	2
Sipora Utara	2	11	5	5	1
Siberut Selatan	5	30	9	4	2
Siberut Barat Daya	-	19	9	3	1
Siberut Tengah	2	32	11	3	1
Siberut Utara	-	29	6	6	1
Siberut Barat	-	26	12	3	3
Jumlah	20	289	128	39	15

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2023

Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa beberapa bentuk fasilitas kesehatan sudah tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kepulauan Mentawai. Namun, hal yang masih harus menjadi perhatian adalah mengenai ketersediaan alat kesehatan di fasilitas tersebut dan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Daerah yang berbentuk kepulauan memerlukan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap agar sewaktu waktu penanganan kasus kedaruratan lebih cepat. Masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil kehidupan sehari-hari mereka terpapar dengan risiko kesehatan antara lain kurangnya tersedia air bersih dan berkualitas untuk dapat diminum, minimnya ketersediaan makanan yang bergizi dan terbatasnya pelayanan kesehatan dari sektor publik terutama pada saat musim badai.

4.2 Umur Harapan Hidup

Tabel 4.2 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2023

Tahun	UHH
2021	70,73
2022	70,91
2023	71,06

Sumber: IPM 2023 (Hasil SP LF 2020)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan penduduk adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Indikator ini merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UHH didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir

UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita. UHH penduduk Kepulauan Mentawai tahun 2023 mencapai 71,06 tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen poin dibanding UHH tahun 2022 sebesar 70,91.

BAB V

KETENAGAKERJAAN



Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) Tahun 2022

78,25 %



Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Tahun 2022

1,39 %

<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Aspek dasar kehidupan manusia yang tidak kalah pentingnya yaitu ketenagakerjaan, karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Ketenagakerjaan merupakan penggerak roda produksi perekonomian dalam proses produksi barang dan jasa. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Penduduk usia kerja meliputi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara ekonomis telah mampu untuk melaksanakan aktivitas ekonomi dan berpotensi dalam memproduksi barang maupun jasa. Secara populer penduduk usia kerja disebut tenaga kerja dan merupakan salah satu indikator dasar dalam ketenagakerjaan dan mengacu kepada LFA (Labour Force Approach) yang digunakan ILO (International Labour Organization). Semakin besar jumlah tenaga kerja disuatu wilayah maka semakin besar pula penawaran kerjanya, namun jika tidak diikuti dengan peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja (kesempatan kerja) maka terjadilah pengangguran.

5.1 Status Pekerjaan

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
I. Angkatan Kerja	84,35	71,48	78,25
1. Bekerja	83,92	69,66	77,16
2. Pengangguran	0,43	1,82	1,08
II. Bukan Angkatan Kerja	15,65	28,52	21,75
1. Sekolah	7,42	9,35	8,33
2. Mengurus Rumah Tangga	2,16	17,74	9,54
3. Lainnya	6,07	1,44	3,88
Total (I+II)	100	100	100

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

Tabel 5.1 menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kegiatan utama dan jenis kelamin. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa sebanyak 78,25 persen penduduk usia 15 tahun ke atas masuk dalam Angkatan Kerja. Secara umum, persentase penduduk angkatan kerja tetap lebih tinggi daripada penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja yang masuk dalam kategori bekerja sebesar 77,16 persen. Sedangkan Angkatan Kerja yang masuk dalam kategori Pengangguran mencapai angka 1,08 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, tingkat persentase Angkatan Kerja yang bekerja penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada persentase penduduk perempuan. Sedangkan untuk Angkatan Kerja yang pengangguran penduduk perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding penduduk laki-laki.

Tingginya angka pengangguran, khususnya bagi perempuan merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, peranan serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan belum dapat diwujudkan dengan baik. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan fenomena penting dalam era modernisasi dan globalisasi. Pada satu sisi masuknya perempuan ke dalam pasar kerja menggambarkan

terjadinya pergeseran pembahagian kerja secara seksual. Saat ini batas sektor public dan domestik sebagai batas antara wilayah laki-laki dan perempuan menjadi kabur. Kondisi ini tidak hanya terjadi dilapisan sosial tertentu, tapi pada semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan data Sakernas 2022 diketahui bahwa mayoritas status pekerjaan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga tidak dibayar. Persentase ini mencapai 28,13 persen dari keseluruhan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja. Sedangkan persentase status pekerjaan yang paling sedikit adalah berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, dengan besar persentase yaitu 1,18 persen. Hal ini sesuai dengan kondisi lapangan, banyak masyarakat di Kepulauan Mentawai yang mempekerjakan keluarga sendiri untuk bekerja di ladang.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2022

Status Pekerjaan Utama	Total
Berusaha sendiri	22,62
Berusaha dibantu buruh tidak tetap pekerja keluarga tidak dibayar	23,59
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	1,18
Buruh/karyawan/pegawai	20,65
Pekerja bebas	3,91
Pekerja keluarga/tidak dibayar	28,13
Total	100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022

BAB VI

KEMISKINAN



Garis Kemiskinan

Rp 421.113,-

Jumlah Penduduk Miskin

13.760 orang



Persentase

**Penduduk
Miskin (P0)**

13,72

Index Kedalaman

Kemiskinan (P1)

1,98

Index Keparahan

Kemiskinan (P2)

0,48

<https://mentawaikab.bps.go.id>

BAB VI KEMISKINAN

6.1 Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dan juga isu strategis. Berdasarkan konsep BPS, dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan itu sendiri dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. BPS sendiri menggunakan pendekatan dari sisi pengeluaran untuk mengukur kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk miskin diartikan sebagai seseorang yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 6.1 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin
2019	310.033	14,43
2020	340.191	14,35
2021	356.403	14,84
2022	386.152	13,97
2023	421.113	13,72

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)

Garis kemiskinan diartikan sebagai jumlah minimal uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan makanan per orang dalam satu bulan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2019-2023, Garis kemiskinan terus menunjukkan peningkatan. Persentase pertumbuhan garis kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 9,05 % menjadi Rp 421.113. Peningkatan ini dipengaruhi karena adanya penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pada September 2022 sehingga harga-harga komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat pun juga ikut meningkat. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Penurunan

ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan khususnya pada daerah yang dianggap memiliki angka kemiskinan ekstrem untuk bersinergi dan mengoptimalkan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Walaupun penurunan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan namun angka ini telah menunjukkan upaya yang serius untuk penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai. kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional sehingga sebenarnya tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Pada tahun 2023, diperkirakan bahwa jumlah orang miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 13.760 orang.

6.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Untuk melihat perkembangan kemiskinan maka dapat digunakan dua indikator berikut, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin besar P2 menunjukkan semakin lebarnya variasi pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin. Artinya, semakin parah kemiskinan yang terjadi.

Ditahun 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan angka dibanding dengan tahun 2022. Naiknya angka ini mengindasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan, artinya biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk mengangkat orang miskin keluar dari status miskin semakin besar. Begitu juga dengan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal ini menandakan variasi pengeluaran antar penduduk miskin semakin beragam, dalam kata lain disparitas atau kesenjangan antar penduduk miskin semakin besar.

Tabel 6.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2019	1,87	0,45
2020	2,84	0,77
2021	2,43	0,63
2022	1,76	0,36
2023	1,98	0,48

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Isu pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah menjadi isu prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan tepat sasaran. Ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh dengan melaksanakan dua prinsip dasar yaitu tepat individu dan tepat wilayah. Tepat individu berarti pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diberikan kepada penduduk miskin yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan cakupan program. Sementara tepat wilayah artinya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan seyogyanya juga memperhatikan aspek kesejahteraan wilayah yang tercermin dalam dimensi kemiskinan konsumsi dan non-konsumsi rumah tangga.

ST 2023

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan #kuntabel #kompeten
#harmonis #loyal #adaptif #kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Jl. Raya Tuapejat Km. 10, Sipora Utara

Telp.: +62811433642

Homepage: <http://mentawaikab.bps.go.id>

E-mail: bps1301@bps.go.id